

Analisis Kebijakan Dana Desa dengan Sumber-Sumber Lain Pendapatan Desa dan Ketersediaan Fasilitas Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan Desa Kabupaten Bogor

¹Cupian, Moch. Ihsan Maulana Sa'ban, Ahmad Luqman Hakim

¹Universitas Padjadjaran, Indonesia; cupian@unpad.ac.id

Received: March 28, 2023; In Revised: April 22, 2023; Accepted: May 11, 2023

Abstract

Structural poverty is rural poverty that has a longterm effect on poverty. This poverty occurs due to changes in the economic structure. The failure of the industrial sector to absorb labor from the agricultural sector raises the problem of unemployment and a decrease in wages for agricultural sector workers. Economists' opinion that poverty will move from rural to urban areas, then when rural poverty decreases, it has an impact decreasing urban poverty. This study focuses on the factors affecting rural poverty, while the purpose of this study is to see the impact of the village fund program on rural poverty using the difference in difference method and to see how village funds program, allocation of village funds, local tax for village, local retribution for village and the numbers of educational facilities in villages are affecting rural poverty. The research data is in the form of a panel consisting of 416 villages in Bogor Regency with a time series of two years. Furthermore, the data is processed using the ordinary least square approach. The results of the analysis show that the village funds program has an ineffective impact in reducing rural poverty, while the allocation of village funds, local taxes for villages, and local fees for villages have a significant effect with a negative relationship.

Keywords: rural poverty, village funds, local taxes for villages, local retribution, educational facilities.

Pendahuluan

Berpenduduk sebesar 270,625,568 jiwa di tahun 2019 membuat negara Indonesia bertengger di posisi empat dalam hal banyaknya jumlah penduduk di dunia, dari angka tersebut sebesar 5,965,410 jiwa disumbang oleh Kabupaten Bogor yang merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, diperparah lagi dengan kenyataan bahwa Kabupaten Bogor juga memiliki tingkat pengangguran terbuka terbesar ketujuh di Jawa barat dan jumlah masyarakat miskin terbanyak di Jawa barat pada tahun 2019 dengan 395 ribu jiwa. Dengan luas wilayah Kabupaten Bogor adalah 2,664 km² menurut Munawir (2005) berdasarkan kepadatan daerah maka daerah Kabupaten Bogor berada pada kelompok sedang dengan 22.39 jiwa/ha.

Kepadatan penduduk memiliki dampak negatif bagi keadaan sosial dan ekonomi, efek sosial yang tercipta adalah munculnya banyak interaksi sosial, yang mengakibatkan peningkatan tingkat *stress* atau penyakit mental penduduk suatu negara. Adapun efek ekonomi yang tercipta adalah munculnya kelompok sosial ekonomi rendah yang memiliki kecenderungan untuk tinggal dekat dengan pusat kota dan kelompok sosial menengah memilih tinggal di luar pusat kota (Winsborough, 1965).

Melihat dari sudut pandang ekonomi, kepadatan penduduk terjadi salah satunya karena migrasi penduduk desa ke kota yang pada akhirnya menyebabkan terbentuknya "kantong kemiskinan", di mana fenomena tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan dan ketimpangan di kota akan meningkat (Mitlin, 2004). Kantong kemiskinan atau "*pockets of poverty*" yang tercipta, yaitu terbentuk karena adanya peningkatan drastis jumlah penduduk di suatu wilayah ekonomi (kota) akibat dari cepatnya pola migrasi penduduk desa ke kota, dan menghasilkan daerah kumuh yang berada di pusat kota.

Analisis ekonomi meyakini secara bertahap kemiskinan akan bergeser dari daerah pedesaan menuju perkotaan karena masyarakat desa memilih untuk melakukan migrasi karena mereka

beranggapan dengan tinggal di kota akan jauh lebih mudah untuk mencari pendapatan, konsumsi pangan bergizi dan akses yang lebih mudah dalam layanan masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan (Mitlin, 2004).

Perkembangan kemiskinan desa dan kota, berawal dari terbatasnya mata pencaharian di desa sehingga memicu adanya perpindahan masyarakat miskin desa untuk mencari penghidupan yang lebih layak di perkotaan. Namun, karena kurangnya kemampuan dan juga pendidikan, mereka terpaksa untuk hidup dengan pendapatan seadanya yang pada akhirnya mereka membentuk kantong kemiskinan di perkotaan (Rajab, 2020).

Sen (2001) menyatakan selain dalam kondisi kekurangan pendapatan dan pangan, kemiskinan juga dapat diartikan sebagai kondisi seseorang yang buta huruf, tidak memiliki pendidikan, menderita suatu penyakit, mendapat perlakuan diskriminasi, tidak memiliki kebebasan dan demokrasi sebagaimana haknya sebagai warga sipil, dan bahkan perampasan hak-hak lainnya. Mengacu pada pernyataan tersebut Amartya Sen menitikberatkan kemiskinan pada hal yang bersifat non-fisik, oleh karenanya pernyataan tersebut berkaitan dengan pendidikan, kesehatan dan bahkan hak-hak juga kebebasan seseorang (Yandri & Juanda, 2018).

Pendapat Amartya Sen ini menghasilkan konsep kemiskinan baru yang menjadi kemiskinan kota atau disebut *multidimensional poverty*, di mana penggolongan kemiskinan tidak lagi bersifat unidimensi yang hanya berdasar kepada dimensi moneter, tapi juga berdasar dari beberapa dimensi lain seperti sosial, pendidikan, kesehatan sampai pada dimensi politik (Todaro & Smith, 2015), sedangkan kemiskinan struktural merupakan kemiskinan desa yang terjadi karena transisi besar-besaran satu atau beberapa struktur yang mengakibatkan adanya kelompok yang tersisihkan, kelompok tersisihkan itulah yang menjadi kemiskinan desa (Brady, 2006).

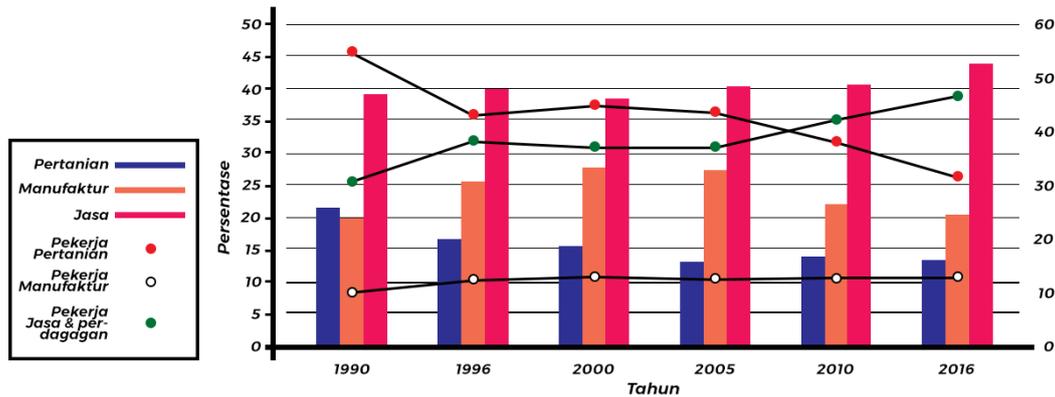
Kemiskinan struktural ini didukung Koentjaraningrat (1983) yang merumuskan penyebab kemiskinan terbagi dalam dua kelompok yaitu efek endogen dan eksogen. Berikut merupakan klasifikasi penyebab kemiskinan (Rejekiingsih, 2011): 1) **Endogen** (penyebab yang muncul dari dalam diri individu). Klasifikasinya adalah Kultural (adanya faktor adat dan budaya yang mengikat individu sehingga individu tersebut tidak dapat mengurangi kemiskinan), dan sifat (memiliki sifat yang tidak bisa membawa peningkatan kesejahteraan individu); 2) **Eksogen** (penyebab yang muncul dari luar diri individu), klasifikasinya adalah alamiah (berkaitan dengan kondisi alam yang menunjang penghidupan bagi masyarakat), dan Struktur atau buatan (faktor buatan yang diatur oleh pemimpin negara yang mana harus dipatuhi dan memiliki pengaruh terhadap kehidupan masyarakat).

Selain Koentjaraningrat, munculnya kemiskinan akibat efek struktural didukung juga oleh Dr. Lee K. Frankel (1906) yang membagi penyebab kemiskinan menjadi empat sebab, yaitu kebodohan (*ignorance*), industri yang tidak efisien (*industrial inefficiency*), melakukan eksploitasi terhadap tenaga kerja (*exploitation of labor*) dan yang terakhir adalah pemerintah yang tidak memperhatikan kesejahteraan masyarakat (*defects in governmental supervision of the welfare of citizens*).

Sektor industri yang merupakan tanda perubahan sektor ekonomi dapat menyebabkan kemiskinan, ini terlihat dalam salah satu penyebabnya disebutkan bahwa tidak efisiennya sektor industri hanya akan membawa kemiskinan dan ini terbukti di Indonesia, berikut adalah gambarannya:

Grafik 1.

Kontribusi Tiga Sektor Utama dalam PDB dan Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia Tahun 1990 - 2016



Sumber: *International Labour Organization* (2017)

Mengacu pada Grafik 1, seiring dengan perubahan struktur ekonomi dari pertanian menuju industri, baik dari kontribusi PDB maupun tingkat penyerapan tenaga kerja, sektor pertanian mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Dalam 1990 – 2005 pertanian terus mengalami penurunan kontribusi terhadap PDB sampai pada titik kurang lebih 17.3%, untuk penyerapan tenaga kerja, pada tahun 2016 tenaga kerja yang terserap adalah sebesar 39.40%, walaupun tingkat penyerapan sektor ini terus turun, penyerapannya masih jauh berada di atas industri.

Perkembangan teknologi dan ekonomi digital membawa pengaruh positif bagi perkembangan sektor jasa ini terlihat dari peningkatan kontribusi PDB dan penyerapan tenaga kerja yang selalu berada di posisi puncak dan terus meningkat. Pada 2016, kontribusi PDB jasa melebihi 40% serta peningkatan penyerapan tenaga kerja yang mencapai angka 46.7%.

Amat disayangkan sektor industri manufaktur Indonesia yang pada tahun 1980 digadagadag sebagai negara baru industri, setelah tahun 2005 harus mengalami penurunan kontribusi PDB, ini diperparah dengan ketidakmampuan sektor ini menyerap tenaga kerja yang pada tahun 2016 hanya mampu menyerap 13.12% atau sektor terendah dalam penyerapan tenaga kerja dan bahkan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja setiap tahunnya dari tahun 2000 – 2016 hampir tidak ada perubahan signifikan.

Kondisi ini tidak lazim, dengan kondisi tingkat penyerapan tenaga kerja sektor sekunder yang masih jauh dibandingkan dengan sektor lain, sektor industri tidak dapat bersaing dengan sektor lain dalam hal produktivitas. Oleh karenanya, munculah masalah, yaitu Indonesia banyak menjual barang mentah kepada negara lain, yang merupakan efek dari adanya lompatan sektor ekonomi dari sektor primer atau pertanian menuju sektor tersier atau jasa dan perdagangan, tanpa melewati pengolahan menjadi barang jadi/final dari sektor sekunder atau industri manufaktur.

Masalah lain adalah perubahan sektor ekonomi dari pertanian menuju industri diikuti dengan transfer tenaga kerja dari pertanian menuju industri sehingga ketidakmampuan industri untuk menyerap tenaga kerja maka mengakibatkan menumpuknya tenaga kerja di sektor pertanian dan banyak tenaga kerja yang ditransfer ke sektor industri menjadi pengangguran hingga menyebabkan meningkatnya kemiskinan khususnya di desa.

Huppi dan Ravallion (1990) dengan melakukan penelitian dalam kemiskinan struktural ditemukan hasil berupa memang benar kemiskinan pada tahun 1980-an mengalami penurunan yang signifikan, tapi pengaruhnya hanya pada beberapa sektor tertentu atau tidak merata pengaruhnya dan sektor atau daerah lain tidak merasakan pengaruh tersebut (Suselo & Tarsidin, 2008).

Demi mengatasi kemiskinan desa, pemerintah membuat program khusus bagi desa yaitu program dana desa. Dana desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat dengan tujuan peningkatan pelayanan desa dan meminimalkan kesenjangan di desa dengan fokus pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa berasal dari APBN yang ditransfer kepada APBD lalu dialokasikan ke masing-masing desa di daerah tersebut. Program dana desa wajib digunakan untuk menunjang pembangunan, pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan di desa (Kementerian Keuangan, 2018). Program ini bertujuan untuk mengatasi kemiskinan struktural atau kemiskinan desa, ini terbukti dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Jawa Barat, Kabupaten Bogor diberikan anggaran dana desa terbesar ke-4 di Indonesia untuk dapat mengatasi masalahnya.

Sejalan dengan dana desa, sebagai langkah nyata desentralisasi daerah, pemerintahan desa juga memiliki penerimaan lain yang berguna untuk menunjang kebutuhan desa, menyejahterakan masyarakat desa dan mengatasi masalah kemiskinan desa, seperti alokasi dana desa dan bagian desa dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 14 tahun 2019, alokasi dana desa berasal dari dana perimbangan, sedangkan menurut Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 tahun 2019 BHPRD berasal dari bagi hasil yang diterima sebagai pendapatan asli daerah. Kedua program ini memiliki fungsi yang sama, yaitu sebenar-benarnya untuk kesejahteraan desa, pembelanjaan kegiatan desa dan pengentasan kemiskinan.

Dengan sumber-sumber dana bagi desa tersebut pemerintah pusat mengharapkan adanya peningkatan dalam *human capital* masyarakat desa melalui penguatan pembangunan (fasilitas publik) desa khususnya pendidikan serta kesehatan, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, pelatihan atau pembentukan organisasi bagi masyarakat di desa sehingga masyarakat desa mampu bersaing sebagai tenaga kerja dan mampu memperkecil ketimpangan ekonomi desa dengan kota.

Di Indonesia sendiri telah ada beberapa penelitian yang meneliti pengaruh dana desa terhadap kemiskinan, rata-rata penelitian tersebut menggunakan metode *fixed effect* dan *path analysis* dengan data panel. Susilowati, Susilowati, & Hadi (2017) mengungkapkan bahwa alokasi dana desa, belanja modal, dan produk domestik regional bruto berdampak negatif dan signifikan, sedangkan dana desa berdampak positif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Meneliti efektivitas dana desa Aziz (2016) berpendapat bahwa dana desa terbukti belum memberikan *impact* yang optimal bagi desa dikarenakan masih banyak desa yang belum mandiri bahkan banyak kasus penyalahgunaan dana desa yang terjadi dalam beberapa tahun kebelakang serta masih adanya kekeliruan bagi pemerintah desa dalam memanfaatkan bantuan keuangan seperti dana desa, alokasi dana desa dan lainnya.

Berbeda dengan kedua penelitian sebelumnya, Sari & Abdullah (2017) menyatakan bahwa dana desa dengan kemiskinan memiliki hubungan yang negatif sehingga ketika pemerintah pusat menambah lokasi dana untuk dana desa, itu akan berefek pada pengurangan kemiskinan. Melakukan penelitian dengan memanfaatkan *path analysis*, Aslan, Darma, & Wijaya (2019) dengan studi kasus di Kabupaten Mahakam Ulu, mengemukakan bahwa alokasi dana desa berdampak negatif dan signifikan secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi desa dan secara tidak langsung terhadap kemiskinan desa.

Meneliti tentang pendapatan dan transfer daerah melalui pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan dan pengangguran, Setiyawati & Hamzah (2007) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berdampak negatif dan signifikan secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan secara tidak langsung terhadap kemiskinan dan pengangguran kota di Jawa timur.

Mengacu pada penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa alokasi dana desa dan pendapatan yang didapat daerah berdampak pada penurunan kemiskinan, sedangkan program dana desa dirasa kurang efektif pemanfaatannya sehingga dampak yang diperoleh positif kepada

kemiskinan. Namun, penelitian-penelitian tersebut hanya mengkaji hubungan dana desa dengan kemiskinan tidak meneliti dampak yang diberikan dengan dibuatnya kebijakan dana desa terhadap kemiskinan.

Minimnya bukti empiris terkait penelitian dampak kebijakan transfer dana seperti dana desa di Indonesia membuat penelitian dengan *impact evaluation* dana desa belum bisa ditemukan di Indonesia, namun untuk di luar Indonesia penggunaan *difference in difference* dalam meneliti dampak kebijakan transfer dana telah banyak digunakan, salah satunya yaitu untuk kebijakan *Programa de Educacion, Salud y Alimentacion, subsequently renamed Oportunidades* yang merupakan program transfer dana kepada wanita atau ibu untuk dapat memberikan pendidikan dan kesehatan bagi dirinya dan anaknya di negara Mexico.

Oleh karena itu, terdapat dua tujuan dalam penelitian ini, pertama adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari peningkatan dana desa kepada kemiskinan. Kedua adalah melihat signifikansi pengaruh dari variabel dana desa, alokasi dana desa, pajak daerah bagi desa serta retribusi daerah bagi desa dan ketersediaan fasilitas pendidikan terhadap kemiskinan dengan studi kasus desa-desa di Kabupaten Bogor.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kuantitatif, pendekatan ini berguna sebagai pendekatan yang menggunakan data penelitian berupa angka-angka sebagai penunjang penelitian. Metode yang digunakan adalah metode *Impact evaluation* dengan jenis *difference in difference*, seperti namanya metode ini digunakan untuk mengevaluasi suatu kebijakan atau program dengan cara membandingkan dan melihat dampak yang timbul setelah diberlakukannya kebijakan. *Impact evaluation* terbagi ke dalam beberapa metode di antaranya adalah *propensity score matching, regression discontinuity design, randomized control trials, instrumental variable* terakhir *difference in difference*. (Khandker, Koolwal, & Samad, 2010).

Lance, Guilkey, Hattori & Angeles (2014) menyatakan penggunaan *difference in difference* dilakukan dengan variabel kelompok *control* dan *treatment* dengan adanya selang waktu antara keduanya seperti sebelum dilakukan program kebijakan dan sesudah dilakukan program kebijakan, pada penelitian ini kebijakan yang ingin dilihat dampaknya adalah dana desa. Maka dari itu dilakukan pembuatan variabel *dummy* tahun yang berasal dari tahun 2018 dengan 2019 dan variabel *dummy* dana desa sebagai *dummy group* yang diisi oleh *control group* dan *treatment group*.

Di mana variabel *dummy* tahun untuk melihat perbedaan kemiskinan antara 2018 dengan 2019 dan variabel *dummy* dana desa sebagai *dummy group* yang diisi oleh *control group* dan *treatment group* yang menilai peningkatan anggaran dana desa tahun 2018 dan 2019 di Kabupaten Bogor. Variabel *dummy* berupa angka kategorikal berupa 0 dan 1 di masing-masing variabel memiliki maksud sebagai berikut:

Dummy waktu (D_{19})

$D_{19} = 1$, dapat diartikan sebagai kondisi kemiskinan di tahun 2019

$D_{19} = 0$, dapat diartikan sebagai kondisi kemiskinan di tahun 2018

Dummy group (D_{dd})

$D_{dd} = 1$, dapat diartikan sebagai kondisi kemiskinan setelah diberikan kenaikan dana desa

$D_{dd} = 0$, dapat diartikan sebagai kondisi kemiskinan sebelum ada kenaikan dana desa

Agar lebih jelas berikut adalah model matematika dari *difference in difference* yang berguna untuk melihat dampak kebijakan dana desa di Kabupaten Bogor melalui dua *dummy* yang berbeda:

$$DID = (Y_{T2} - Y_{T1}) - (Y_{C2} - Y_{C1})$$

Keterangan:

DID = *Difference in difference*

Y_{T2} = *Treatment group* sesudah kebijakan

Y_{T1} = *Treatment group* sebelum kebijakan

Y_{C2} = *Control group* sesudah kebijakan

Y_{C1} = *Control group* sebelum kebijakan

Dalam model matematika DID, $(Y_{T2} - Y_{T1})$ adalah *delta treatment group* atau besarnya nilai perubahan *treatment group* dari tahun satu ke tahun lain, begitu juga dengan $(Y_{C2} - Y_{C1})$ yang merupakan *delta control group* atau besarnya nilai perubahan *control group* tahun satu dengan tahun lain. Mengacu pada model maka dapat disimpulkan dalam penggunaan metode DID harus dilakukan dengan memanfaatkan dua *series* waktu dalam penelitian ini 2018 dengan 2019 dan minimal dua grup, dalam penelitian ini grup dengan dana desa meningkat dan grup dengan dana desa tidak meningkat atau bahkan turun.

Selanjutnya, dilakukan estimasi nilai dari parameter-parameter yang ada dalam model matematika tersebut menggunakan analisis ekonometrika dan metode *difference in difference*, yang lalu model yang digunakan adalah model *difference in difference*. Sehingga spesifikasi model ekonometrik pada penelitian ini, yaitu:

$$lkms_{it} = \beta_0 + \beta_1 D_{19} + \beta_2 D_{dd} + \beta_3 (D_{19} \cdot D_{dd}) + \beta_4 ldd_{it} + \beta_5 ladd_{it} + \beta_6 lpdbd_{it} + \beta_7 lrdbd_{it} + \beta_8 lfp_{it} + u_{it}$$

Sedikit berbeda dengan metode estimasi *ordinary least square* biasanya, pada model ini dimasukan model *difference in difference*, yang direpresentasikan dengan variabel *dummy* berupa D_{19} yang merupakan variabel *dummy* tahun (2018 – 2019) dan D_{dd} yang merupakan variabel *dummy* dana desa, *treatment group* adalah dana desa yang meningkat dan *control group* adalah dana desa yang tidak meningkat, terakhir $(D_{19} \cdot D_{dd})$ adalah variabel interaksi dari *dummy* tahun dengan *dummy* dana desa yang berguna untuk melihat dampak keseluruhan yang terjadi akibat dari pengaruh kebijakan dan waktu.

Dikarenakan tiap variabel memiliki satuan yang berbeda oleh karena itu seluruh variabel yang digunakan dijadikan dalam bentuk logaritma agar mendapatkan satuan yang sama. $lkms_{it}$ merupakan variabel *dependent*, sedangkan sisanya ldd_{it} , $ladd_{it}$, $lpdbd_{it}$, $lrdbd_{it}$, lfp_{it} merupakan variabel *independent* yang semua variabel tersebut diubah ke dalam bentuk satuan yang sama yakni logaritma.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang berasal dari tahun 2018 – 2019 yang dimiliki lembaga atau institusi terkait atau data yang diperoleh berupa data yang telah diolah oleh penyedia data, sehingga datanya diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti, maka jenis data yang digunakan merupakan data sekunder atau non-eksperimental.

Sumber data penelitian berasal dari BPS dan DPMD Kabupaten Bogor. Berikut merupakan rangkuman sumber data penelitian:

Tabel 1.
Data dan Sumber Data Penelitian

Data	Rentang waktu	Sumber Data
Jumlah dana desa yang diterima 416 desa di Kab. Bogor	2018 – 2019	Badan Pemberdayaan Manusia dan Desa Kabupaten Bogor
Jumlah alokasi dana desa yang diterima 416 desa di Kab. Bogor	2018 – 2019	Badan Pemberdayaan Manusia dan Desa Kabupaten Bogor
Jumlah pajak daerah bagi desa yang diterima 416 desa di Kab. Bogor	2018 – 2019	Badan Pemberdayaan Manusia dan Desa Kabupaten Bogor
Jumlah retribusi daerah yang diterima 416 desa di Kab. Bogor	2018 – 2019	Badan Pemberdayaan Manusia dan Desa Kabupaten Bogor
Jumlah fasilitas pendidikan yang tersedia di 416 desa Kab. Bogor	2018 – 2019	Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor
Kemiskinan di 416 desa di Kab. Bogor	2018 – 2019	Badan Pemberdayaan Manusia dan Desa Kabupaten Bogor

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2023)

Teknik analisis data yang digunakan berupa analisis regresi sederhana (*simple regression analysis*), pemilihan teknik ini bertujuan untuk menganalisis signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen oleh karena itu regresi sederhana disebut juga sebagai regresi linear dua variabel (Wooldridge M. J., 2012). Tidak lupa dalam menilai dampak kebijakan digunakan metode *difference in difference*, alasan penggunaan metode ini adalah karena DID merupakan metode yang termasuk dalam metode *impact evaluation* yang membantu regulator dalam menilai dampak yang diberikan oleh kebijakan yang telah dibuatnya, apakah tepat sasaran, mengukur perubahan kesejahteraan dari suatu intervensi pemerintah melalui kebijakan (Khandker, Koolwal, & Samad, 2010).

Variabel dependen dari penelitian ini adalah kemiskinan desa karena memiliki tujuan penelitian untuk melihat dampak kebijakan dana desa dan melihat pengaruh variable-variabel independen terhadap kemiskinan desa. Alasan pemilihan kemiskinan desa sebagai variabel terikat adalah karena kelima variabel bebas yang digunakan memiliki orientasi *output* kepada kesejahteraan masyarakat desa dan artinya harus menekan kemiskinan yang ada di desa.

Kemiskinan sendiri memiliki sinonim kemelaratan, ketidakcukupan, mengemis, yang di mana diartikan sebagai keadaan seseorang dalam kekurangan atau bahkan tidak memiliki uang dan harta benda dalam jumlah yang dapat diterima secara sosial ekonomi dalam lingkungannya untuk membantunya memenuhi kebutuhan (Barry, 2017). Maka kemiskinan desa merupakan total populasi masyarakat miskin yang hidup di desa dan masuk kedalam kriteria miskin yaitu melarat, kekurangan dan tidak memiliki uang dan terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat (KPM).

Adapun kemiskinan desa terbentuk akibat adanya perubahan suatu struktur baik itu ekonomi, politik atau sosial, oleh karenanya kemiskinan desa disebut juga sebagai kemiskinan struktural yang terjadi karena transisi besar-besaran satu atau beberapa struktur yang mengakibatkan adanya kelompok yang tersisihkan, kelompok tersisihkan itulah yang menjadi kemiskinan desa (Brady, 2006).

Variabel independen atau penjelas diartikan sebagai variabel yang berguna untuk menjelaskan variasi yang tercipta oleh adanya variabel terikat yang digunakan untuk dianalisis dalam penelitian (Wooldridge, 2012). Variabel ini diduga menjadi penyebab suatu fenomena terjadi, oleh karenanya variabel ini dikenal juga sebagai variabel “penyebab”, selain itu variabel independen ini juga disebut variabel *explanatory* atau variabel penjelas, karena variabel ini harus mampu menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Dalam penelitian ini variabel bebas yang digunakan berjumlah lima variabel, agar lebih jelas berikut ditampilkan variabel yang digunakan:

- ldd_{it} = Dana desa
- $ladd_{it}$ = Alokasi dana desa
- $lpdbd_{it}$ = Pajak daerah bagi desa
- $lrdbd_{it}$ = Retribusi daerah bagi desa
- lfp_{it} = Fasilitas Pendidikan

Hasil dan Pembahasan

Analisis Statistik

Seperti yang dijabarkan sebelumnya, penggunaan metode *impact evaluation* digunakan untuk mengidentifikasi dampak yang terjadi akibat kebijakan dana desa, oleh karenanya penelitian ini menggunakan *difference in difference* yang merupakan bagian dari *impact evaluation*, dalam *difference in difference* perubahan yang tercipta akibat dampak kebijakan dapat diidentifikasi melalui regresi yang dilakukan dengan variabel *dummy* yang menggambarkan waktu dan variabel (D_{19}), *dummy group* yang terbagi dalam *group control* dan *treatment* (D_{dd}) dan variabel *dummy* interaksi ($D_{19}D_{dd}$) terhadap kemiskinan desa ($lkms$), yang selanjutnya dicari nilai rata-rata dari variabel kemiskinan dengan melalui *dummy* tahun dan *dummy* dana desa. Agar lebih jelas berikut ditampilkan analisis *difference in difference* dari hasil regresi penelitian ini:

Tabel 2.

Analisis Difference in Difference

	(1)	
	$lkms$	<i>Std. Err.</i>
D_{19}	-0.3253***	(0.0821)
D_{dd}	0.1242**	(0.0442)
$D_{19}D_{dd}$	0.2892**	(0.1015)
N	831	

P-values in parentheses
* $P < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

	D_{19}	D_{dd}	$lkms$
Baris 1	0	0	6.511834
Baris 2	0	1	6.636116
Baris 3	1	0	6.186508
Baris 4	1	1	6.599994

Model matematis *difference in difference*
 $DID = (Y_{T2} - Y_{T1}) - (Y_{C2} - Y_{C1})$

<i>Control</i>	<i>Treatment</i>	<i>Interaction</i>
Baris 3 – Baris 1	Baris 4 – Baris 2	(<i>Treatment – Control</i>)
6.186508 – 6.511834	6.599994 – 6.636116	-0.03612 – (-0.32533)
<i>Difference in difference</i>		0.2892

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2023)

Tabel 2 berisikan tiga tabel yang saling terhubung, tabel pertama merupakan tabel yang berisikan hasil regresi variabel *dummy* terhadap yang berguna untuk mengidentifikasi dampak perubahan dari diberlakukannya kebijakan dana desa. Selanjutnya tabel kedua merupakan hasil dari pencarian rata-rata (*mean*) data dari variabel *lkms* dengan menggunakan atau melalui variabel D_{19} dan D_{dd} .

Tabel tiga, tabel ini digunakan untuk menghitung nilai dari difference in difference dalam dijalankannya kebijakan dana desa di Kabupaten Bogor dengan menggunakan perhitungan persentase kemiskinan dalam *group treatment* dari data rata-rata variabel *lkms* dikurangi dengan persentase *group control* dan hasilnya merupakan dampak perubahan yang dibawa oleh kebijakan dana desa di Kabupaten Bogor di tahun 2018-2019.

R-squared atau koefisien determinasi yang dihasilkan yaitu, sebesar 0.3568 atau 35.68%. Jadi dapat disimpulkan bahwa, variabel dana desa, alokasi dana desa, pajak daerah bagi desa, retribusi daerah bagi desa, fasilitas pendidikan serta variabel *dummy* memiliki kemampuan dalam menjelaskan variabel kemiskinan desa sebesar 35.68%. Sedangkan sisanya sebesar 64.32% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

Melakukan pengujian signifikansi parsial pada semua variabel bebas dengan *P-values* 0.05, didapatkan hasil berupa variabel fasilitas pendidikan, dana desa, alokasi dana desa, retribusi daerah bagi desa dan pajak daerah bagi desa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen atau kemiskinan desa. Selanjutnya berdasarkan hasil uji signifikansi simultan, variabel fasilitas pendidikan, dana desa, alokasi dana desa, retribusi daerah bagi desa, pajak daerah bagi desa dan *dummy* tahun, *dummy* dana desa, *dummy* interaksi signifikan pada tingkat lima persen dengan kemiskinan desa secara simultan.

Analisis Hasil Regresi

Berdasar pada hasil regresi penelitian ini, dapat dilihat bahwa variabel *dummy* tahun yang berguna untuk melihat ada tidaknya perubahan kemiskinan pada tahun 2018 dengan tahun 2019 dalam penelitian, memiliki hubungan yang negatif serta berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kemiskinan desa di 416 desa yang ada pada Kabupaten Bogor. Dengan nilai koefisien yang diperoleh ialah sebesar -0.3253, maka dapat disimpulkan dengan mengasumsikan variabel lain konstan, maka terdapat perbedaan kemiskinan desa di 416 desa yang ada pada Kabupaten Bogor, yaitu terjadi penurunan kemiskinan dari tahun 2018 menuju tahun 2019 sebesar 0.3253%, *ceteris paribus*.

Berdasarkan hasil regresi variabel ini memiliki pengaruh yang signifikan dengan *P-values* sebesar 0.05, dengan hubungan yang positif dengan kemiskinan desa di 416 desa yang ada pada Kabupaten Bogor. Dengan nilai koefisien yang diperoleh ialah sebesar 0.1242, maka dapat disimpulkan dengan mengasumsikan variabel lain konstan, dana desa yang diberikan pada tahun 2019 memberikan efek peningkatan sebesar 0.1242% terhadap kemiskinan desa di 416 desa yang ada pada Kabupaten Bogor di tahun 2019, *ceteris paribus*.

Sedangkan untuk variabel interaksi yang berguna untuk mengidentifikasi perbedaan dampak yang diberikan oleh dana desa di tahun 2018 dengan 2019 menghasilkan sebuah kesimpulan dengan dampak yang tercipta signifikan dan hubungan positif, maka peningkatan dana desa yang dilakukan pemerintah pada tahun 2019 menghasilkan peningkatan kemiskinan dibandingkan 2018 di Kabupaten Bogor sebesar 0.2892%, *ceteris paribus*.

Variabel dana desa terbukti memiliki hubungan positif serta pengaruh yang signifikan terhadap variabel kemiskinan desa di 416 desa yang ada pada Kabupaten Bogor, dengan hasil koefisien regresi sebesar 1.5843. Hasil regresi ini dapat diinterpretasikan dengan mengasumsikan variabel lain konstan, maka setiap penambahan satu persen pada jumlah dana desa yang

dikucurkan oleh pemerintah pusat akan meningkatkan kemiskinan desa di 416 desa yang ada pada Kabupaten Bogor sebesar 1.5843%, *ceteris paribus*.

Hasil tersebut disinyalir akibat dari pemanfaatan dana desa yang hanya sebesar 6.7% digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa, sedangkan 87.7% dari total dana desa diarahkan menuju pembangunan fisik berupa fasilitas, sarana dan prasarana desa, ditambah dengan kualitas dari hasil pembangunan fisik yang masih kurang baik dan perawatan terhadap fasilitas yang masih kurang, serta tidak sedikit pembangunan tersebut tidak sesuai sasaran akibat dari lemahnya perencanaan yang diatur pemerintah desa sehingga pembangunan desa terasa tidak memberikan dampak positif bagi desa. Selain itu *impact* yang tidak optimal bagi desa dikarenakan masih banyak desa yang belum mandiri serta masih adanya kekeliruan bagi pemerintah desa dalam memanfaatkan bantuan keuangan seperti dana desa, alokasi dana desa dan lainnya.

Variabel alokasi dana desa memiliki hubungan yang negatif serta pengaruh yang signifikan terhadap variabel kemiskinan desa dengan nilai koefisien sebesar -0.2995. Dengan mengasumsikan variabel lain konstan, maka setiap penambahan satu persen pada jumlah alokasi dana desa oleh pemerintah daerah akan menurunkan kemiskinan desa di 416 desa yang ada pada Kabupaten Bogor sebesar 0.2995%, *ceteris paribus*.

Berbeda dengan dana desa yang pemanfaatannya mayoritas demi menunjang pembangunan fisik desa, penggunaan alokasi dana desa ditujukan kepada pemenuhan segala kebutuhan desa yang mana itu berarti mencakup segala sektor, fungsi penting alokasi dana desa adalah pembelanjaan kegiatan desa yang terdiri dari pelaksanaan pembangunan desa, penanggulangan bencana dan keadaan darurat yang terjadi di desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, dan terakhir pembinaan kemasyarakatan desa. Alokasi dana desa dianggap tepat dan efektif sebagai katalisator kemiskinan melalui pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, hal ini sesuai dengan Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007, yang menyatakan bahwa ADD bertujuan sebagai dana yang berguna sebagai alat ekonomi yang berguna untuk mengentaskan kemiskinan desa.

Variabel pajak daerah dan retribusi daerah bagi desa sama-sama memiliki hubungan yang negatif dan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kemiskinan desa. Besaran nilai koefisien yang diperoleh oleh variabel pajak daerah serta retribusi daerah bagi desa berturut-turut yaitu sebesar -0.3333 dan -0.1766. Dengan mengasumsikan variabel lain konstan, maka setiap penambahan satu persen pada hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang dialokasikan pada desa akan menurunkan kemiskinan desa di 416 desa yang ada pada Kabupaten Bogor sebesar 0.3333% dan 0.1766%, *ceteris paribus*.

Sebagai dua komponen pendapatan asli daerah, pajak daerah dan retribusi daerah digunakan pemerintah daerah untuk menunjang aktivitas sektor-sektor terkait yang mendorong pertumbuhan ekonomi, sedangkan di desa pajak daerah dan retribusi daerah bagi desa (BHPRD) memiliki fungsi yang sama seperti ADD sebagai pengeluaran kegiatan desa, oleh karenanya BHPRD salah satunya berfokus pada pembiayaan sektor yang menunjang masyarakat desa dalam sisi *human capital* seperti sektor pendidikan, pemberdayaan serta kesehatan dan lainnya. Memfokuskan pengeluaran desa pada sektor-sektor vital tersebut berdampak pada peningkatan *human capital* masyarakat desa, sehingga pengentasan kemiskinan pun dapat dilakukan walaupun hasilnya kurang komprehensif.

Variabel fasilitas pendidikan terbukti memiliki hubungan positif serta pengaruh yang signifikan terhadap variabel kemiskinan desa di 416 desa yang ada pada Kabupaten Bogor, dengan hasil koefisien regresi sebesar 0.1599. Dengan mengasumsikan variabel lain konstan, maka setiap penambahan satu persen pada jumlah fasilitas pendidikan yang dibangun oleh pemerintah daerah maupun swasta akan meningkatkan kemiskinan desa di 416 desa yang ada pada Kabupaten Bogor sebesar 0.1599%, *ceteris paribus*.

Hasil tersebut disinyalir akibat dari kurang bersinerginya pemerintah sebagai perencana dengan dinas atau instansi pendidikan sebagai penyelenggara sehingga pembangunan fasilitas pendidikan tidak optimal dari segi demografi desa. Selain itu alasan sistem pendidikan, kurikulum, sampai tenaga pendidik pun dirasa masih kurang mumpuni untuk meningkatkan *human capital* masyarakat desa.

Simpulan

Peningkatan anggaran dana program dana desa dirasa kurang berdampak positif dalam mengurangi kemiskinan desa di Kabupaten Bogor, hal ini didasari hasil analisa statistik dari *difference in difference* yang menyatakan peningkatan dana desa di 2019 ikut meningkatkan jumlah masyarakat miskin yang ada di desa Kab. Bogor. Ini didukung dari segi analisa pengaruh yang tercipta antara variabel dana desa terhadap variabel kemiskinan desa bersifat positif, yang artinya apabila pemerintah meningkatkan jumlah dana desa itu akan membawa peningkatan pada jumlah masyarakat miskin desa di Kabupaten Bogor.

Kebijakan dana desa diarahkan pada pemenuhan dan peningkatan sektor pembangunan fisik desa dengan tujuan mengentaskan kemiskinan struktural. Untuk mengatasi masalah kemiskinan struktural yang mana merupakan kemiskinan jangka panjang, pemerintah membuat kebijakan dana desa yang kebijakannya bersifat pengentasan kemiskinan jangka panjang juga melalui pembangunan desa, oleh karenanya dana desa apabila diteliti secara jangka pendek tidak akan terlihat memberikan dampak positif pada pengentasan kemiskinan struktural atau desa, karena memang dampak yang diberikan dana desa adalah jangka panjang.

Namun, pengurangan jumlah masyarakat miskin desa dapat dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan alokasi dana desa dan BHPRD oleh pemerintah desa, karena mengacu pada hasil analisa statistik baik alokasi dana desa atau BHPRD keduanya memiliki pengaruh yang positif terhadap pengurangan kemiskinan desa. Itu disebabkan karena alokasi dana desa dan BHPRD difungsikan pada sektor-sektor vital desa melalui pembelanjaan kegiatan desa.

Referensi

- Allen, R. C. (2017). Absolute Poverty: When Necessity Displaces Desire. *American Economic Review*, 107(12), 3690–3721.
- Anggrairi, E. S., Subagyo, A., & Radianto, D. O. (2019). Analisis Pengaruh Fasilitas Pendidikan Terhadap Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan di Wilayah Indonesia Tahun 2018. *Jurnal Pendidikan*, 3(2), 109-115.
- Aslan, Darma, D. C., & Wijaya, A. (2019). Have Village Funds Impact Growth Economy And Poverty Rate? *International Journal of Scientific & Technology Research*, 8(10), 2601-2605.
- Aziz, N. L. (2016). Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa. *Jurnal Penelitian Politik*, 193-211.
- Barry, K. (2017). The narrative on poverty has failed. In K. Barry, *Rethinking Poverty: What makes a good society?* (pp. 5-28). Bristol, UK; Chicago, IL, USA: Bristol University Press. doi:10.2307/j.ctv43vv1s
- Brady, D. (2006, April). Structural theory and relative poverty in rich Western democracies, 1969–2000. *Research in Social Stratification and Mobility*, 24(2), 153-175. doi:10.1016/j.rssm.2005.02.004
- Brady, D. (2019). Theories of the Causes of Poverty. *Annual Review of Sociology*, 45(1), 155-175.

- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. (2015). *Pengantar Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan.
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. (2018). *Retribusi Daerah*. Jakarta: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan RI.
- DJPK Kemenkeu. (2018). *Buku Pintar Dana Desa*. Jakarta: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- International Labour Organization. (2017). *Laporan Ketenagakerjaan Indonesia Tahun 2017*. Jakarta: Organisasi Perburuhan Internasional.
- Jumadi. (2015). Karakteristik Struktur Output Sektor Ekonomi dan Disparitas Regional di Indonesia Periode 2000 – 2010. Bogor, Jawa barat, Indonesia: Institut Pertanian Bogor.
- Kaboski, J. P., & Townsend, R. M. (2012). The impact of credit on village economies. *American Economic Journal Economics*, 4(2), 98-133.
- Kementerian Keuangan. (2018). *Buku Saku Dana Desa: Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Khandker, S. R., Koolwal, G. B., & Samad, H. A. (2010). *Handbook on Impact Evaluation: Quantitative Methods and Practices*. Washington DC: The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank.
- Krisianto, A. (2018). Dampak Elektrifikasi Terhadap Pengeluaran Rumah Tangga di Kepulauan Seribu, Jakarta. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 164-173.
- Lance, P. M., Guilkey, D. K., Hattori, A., & Angeles, G. (2014). *How Do We Know If a Program Made a Difference?: A Guide to Statistical Methods for Program Impact Evaluation*. Chapel Hill, North Carolina: MEASURE Evaluation.
- Mitlin, D. (2004). *Understanding Urban Poverty: What the Poverty Reduction Strategy Papers tell us (pp. 1-3, Rep.)*. International Institute for Environment and Development.
- Peraturan Bupati Bogor Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019.
- Peraturan Bupati Bogor Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2019.
- Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pengalokasian dan Tata Cara Penyaluran Bagian Desa dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019.
- Peraturan Bupati Bogor Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018.
- Peraturan Bupati Bogor Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2018.
- Peraturan Bupati Bogor Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Pengalokasian dan Tata Cara Penyaluran Bagian Desa dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2018.
- Rajab, B. (2020). Kemiskinan Struktural dan Cara Penanggulangannya. *JURNAL KASYAF*, 2, 6 - 13.
- Rejekiningsih, T. W. (2011). Identifikasi Faktor Penyebab Kemiskinan di Kota Semarang dari Dimensi Kultural. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(1), 28-44.
- Riduansyah, M. (2003). Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Makara, Sosial Humaniora*, 7(2), 49-57.

- Sari, I. M., & Abdullah, M. F. (2017). Analisis Ekonomi Kebijakan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Desa di Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(1), 34-49. doi:10.22219/jep.v15i1.4645
- Setiyawati, A., & Hamzah, A. (2007). Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran: Pendekatan Analisis Jalur. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 4(2), 211-228.
- Sitanggang, I. R., & Nachrowi, N. D. (2004). Pengaruh Struktur Ekonomi pada Penyerapan Tenaga Kerja Sektoral: Analisis Model Demometrik di 30 Propinsi pada 9 Sektor di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 5(1), 103-133.
- Suselo, S. L., & Tarsidin. (2008). Kemiskinan di indonesia: pengaruh pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 153-194.
- Susilowati, N. I., Susilowati, D., & Hadi, S. (2017). Pengaruh Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Belanja Modal, dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(4), 514-526.
- Tacoli, C., McGranahan, G., & Satter, D. (2015). *Urbanisation, rural–urban migration and urban poverty*. London: International Institute for Environment and Development.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development, 12th edition*. New Jersey: Pearson.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.
- Winsborough, H. H. (1965). The Social Consequences of High Population Density. *Law and Contemporary Problems*, 120-126.
- Wooldridge, M. J. (2012). *Introductory Econometrics: A Modern Approach Fifth Edition*. Cengage Learning.
- Yandri, P., & Juanda, B. (2018). Memahami Karakter Kemiskinan Perkotaan dengan Pendekatan Observasional. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 19(1), 75-84. doi:10.18196/jesp.19.1.4276